

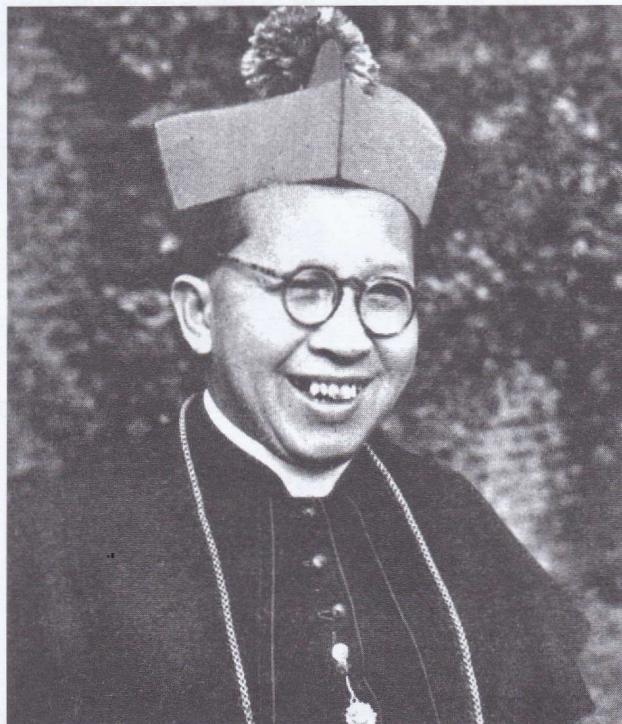


Theodorus Sudimin

Menjadi Umat Katolik Yang Peduli dan Aktif (2)

(Tulisan ini merupakan bagian kedelapan [terakhir] dari penulisan bahan rekoleksi para imam diosesan UNIO Keuskupan Agung Semarang (KAS) yang berlangsung pada tanggal 17-18 Maret 2020 di Pusat Patoral Sanjaya Muntilan dan penulis menjadi pendampingnya. Rekoleksi ini mengolah tema "Belajar dan Meneladan Sosok Soegijapranata"- red.)

"Sebab kita adalah sungguh-sungguh Katolik, dari pada itu kita adalah sebenar-benarnya patriot juga. Oleh karena kita merasa patriot seratus prosen, sebab itu kita pun merasa Katolik seratus prosen pula"



Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No.152 tahun 1963 tanggal 26 Juli tentang pengangkatan Mgr Albertus Soegijapranata SJ sebagai Tokoh Nasional.

TULISAN pada edisi yang lalu dengan judul yang sama memfokuskan pada pengajaran Mgr Soegijapranata tentang bagaimana menjadi umat Katolik yang peduli dan aktif dalam kehidupan bangsa dan negara sebagai ekspresi sikap mencintai tanah air. Tulisan ini memfokuskan PADA tindakan-tindakan beliau sebagai

wujud dari kecintaannya kepada tanah air. Karena itu tulisan ini merupakan kelanjutan langsung yang tidak bisa dipisahkan dengan tulisan edisi yang lalu. Dua tulisan bagaikan dua sisi, yaitu pengajaran dan tindakan Mgr Soegijapranata dalam mencintai tanah air. Bagian awal yang meliputi landasan biblis, kesadaran sebagai warga, dan hak setiap bangsa untuk merdeka diasumsikan telah dibaca sehingga tidak ditulis ulang.

Pendudukan tentara Jepang

Rama A Soegijapranata SJ diangkat menjadi uskup bersamaan dengan krisis perang dunia. Dua tahun mengembalikan vikariat baru Semarang, Perang Dunia II meletus. Tentara Jepang menduduki bumi Nusantara dengan bahasa akan memberikan kemerdekaan kepada

bangsa Indonesia dan Jepang mengakui sebagai saudara tua Indonesia. Meskipun beliau bukan pemimpin politik dan Gereja bukan lembaga politik, pendudukan tentara Jepang membawa imbas kepada Gereja Katolik.

Dengan dasar pemikiran bahwa semua hal yang 'berbau' Belanda harus dilarang dan dimusnahkan atau diambil alih tentara Jepang. Bahasa Belanda dilarang diajarkan di sekolah dan dilarang digunakan; bendera merah putih biru tidak boleh berkibar; rumah sakit dan gedung-gedung lain untuk pelayanan pastoral yang dikelola oleh para biarawan biarawati berkebangsaan Belanda disita oleh tentara pendudukan Jepang; dan yang lebih fatal adalah semua imam dan para calon imam, biarawan biarawati berkebangsaan Belanda ditangkap dan ditahan tentara Jepang.

Saat tentara Jepang datang di gereja Katedral untuk memintanya guna keperluan mereka, Mgr Soegijapranata menerima kedatangan mereka dengan sikap dan jawaban heroik, "Ini tempat yang kudus beserta alat perlengkapan yang dikuduskan. Saya tidak akan dapat mengizinkan. Anda hanya dapat memenggal kepala saya dulu, baru sesudah itu Anda dapat memakai tempat itu" (kutipan oleh Boelaars, 2005:119). Sikap itu bukan hanya untuk



melindungi gereja, melainkan sekaligus sebagai sebuah sikap menolak penguasaan atas bangsanya oleh bangsa lain. Sebagai seorang warga yang ikut mencita-citakan bangsanya merdeka, beliau tentu sangat tidak ingin pendudukan Jepang terus berlangsung, maka tidak terlintas jalinan kerjasama dengan tentara Jepang. Sebagai pemimpin Gereja Vikariat Semarang, seringkali beliau diundang pada acara-acara yang diselenggarakan oleh penguasa pendudukan Jepang, namun kehadirannya hanya diwakili dengan rangkaian bunga.

Sebagaimana pernah dituliskan pada tahun 1928 bahwa sebagai bangsa Indonesia berhak untuk merdeka dan kemerdekaan itu telah diperjuangkan, maka sesaat setelah Soekarno dan Mohammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan, beliau langsung memerintahkan untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman pastoran Gedangan. Pengibaran bendera itu sebagai bentuk dukungan terhadap Indonesia negara merdeka dan sekaligus mengungkapkan kegembiraannya. Sebagai tindakan pertama kali pengibaran bendera negara, tentu momen itu sangat emosional.

Dengan proklamasi kemerdekaan tidak serta merta semua meletakkan senjata; bunyi senjata perang masih terdengar; peluru masih menysar ke mana-mana. Peperangan justru melibatkan banyak pihak: tentara Jepang, tentara Belanda, pejuang republik, dan tentara sekutu. Artinya, tentara Jepang tidak begitu saja meninggalkan tanah air. Demikian pula pemerintah Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober 1945 masih terjadi pertempuran di Semarang yang kemudian dikenal 'Perang Lima Hari Semarang'. Pertempuran itu, "memaksa kami untuk mendesak Sekutu (Inggris) dan Jepang mengakhiri serangan diantara pemuda dan Jepang yang makan banyak korban dari penduduk".

Akibat dari pertempuran itu adalah terjadinya kekacauan dan kelangkaan bahan makanan. Atas kondisi tersebut Mgr Soegijapranata tidak mungkin mengatasi sendiri, maka beliau mengirim dua orang utusan penduduk Semarang (Theo: namanya Dwidjasiswa dan Kadarisman) dengan menumpang sebuah bomber milik tentara Inggris ke Jakarta untuk menghadap Perdana Menteri Sjahrir guna memohon supaya segera

dikirimkannya tenaga Indonesia (Theo: namanya Mr Ikhsan) ke Semarang untuk mengakhiri rampasan sepanjang hari segala rumah yang ditinggalkan begitu saja oleh penduduk dan menyediakan bahan makanan.

Dua tindakan itu beliau ceritakan saat menyampaikan pidato perayaan 12,5 tahun Vikariat Semarang tanggal 4 Februari 1953. Latarbelakang tindakan itu adalah kesadaran diri "sebagai Vikaris Apostolik kami bertugas memperusahakan diri untuk menyelamatkan, memelihara dan memimpin umat Katolik. Sebagai penduduk kota besar Semarang dan anak suku bangsa Jawa, kami berwajib sedapat mungkin turut serta dalam menghindari segala macam bahaya kekacauan dan kerugian besar yang mengancam kota, nusa dan bangsa".

Belanda tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kembali memblokir, sehingga para pemimpin negara terpaksa memindahkan ibukota ke Yogyakarta (1946-1949). Sebagai bentuk dukungan kepada pemimpin republik dan kecintaannya kepada negara, Mgr Soegijapranata ikut berpindah tempat tinggal ke Yogyakarta dan menempati Gereja St Yusup Bintaran. Selama tinggal di Yogyakarta itu terjalin komunikasi dan persahabatan yang

Tanpa mengangkat senjata, Mgr Soegijapranata terus ikut berperang. Beliau menempuh jalur media. Strategi media dilakukan untuk menghadapi blokade yang dilakukan Belanda dengan cara mengirimkan tulisan ke majalah Amerika Serikat Commonwealth.

sangat intens antara Mgr Soegijapranata dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta.

Kepindahan beliau ke Yogyakarta dapat dipandang sebagai sebuah tindakan politis, yaitu “untuk menunjukkan bahwa Gereja Katolik memilih menyatu dengan para pemimpin republik dan para pejuang daripada tinggal di Semarang yang masih berada dalam pendudukan ketika ibukota berpindah ke Yogyakarta. Ini adalah bukti dan sekaligus pesan ke arah mana Gereja berpihak, yaitu menyatu dengan pejuang seluruh bangsa” (Mgr. Suharyo, 2001).

Berperan dalam diplomasi

Tanpa mengangkat senjata, Mgr Soegijapranata terus ikut berperang. Setelah beberapa hal di atas dilakukan, beliau menempuh jalur media. Strategi media dilakukan untuk menghadapi blokade yang dilakukan Belanda dengan cara membuat tulisan dan mengirimkannya ke sebuah majalah Amerika Serikat Commonwealth. Tulisan itu menggambarkan situasi blokade sebagai blokade pemikiran dan

informasi, ketiadaan pakaian, bahan makanan, susu, dan buku-buku. Beliau menyerukan kepada dunia internasional untuk mengirimkan bahan bacaan ke daerah Republik agar bangsa Indonesia bebas dari komunisme maupun imperialisme. Beliau ingin mencari simpati dan dukungan dunia internasional dan ingin menunjukkan bahwa Indonesia masih ada dan Belanda kembali mendudukinya (Sudimin, 2015).

Selain itu beliau juga menulis di majalah De Linie milik Serikat Yesus Belanda. Beliau memaparkan pelanggaran HAM oleh tentara Belanda selama menduduki Yogyakarta. Beliau melukiskan aksi militer kedua Belanda di Indonesia untuk “meraih kembali apa yang telah hilang, menghukum masa lalu, menghidupkan kembali apa yang telah pergi, membalik ketidakhormatan dan kehinaan yang diderita pada masa lalu dengan menggunakan kekerasan senjata dan unjuk kekuasaan” (Gerry van Klinken, 2010: 276).

Salah satu yang menentukan eksistensi sebagai sebuah negara merdeka adalah pengakuan negara-negara lain. Pengakuan Tahta Suci Vatikan terhadap kedaulatan Republik

Indonesia yang dimulai dengan kunjungan delegasi Tahta Suci Vatikan beberapa kali tahun 1947-1948 dan akhirnya Indonesia menempatkan Wirjopranoto sebagai Duta Besar di Vatikan pada tahun 1950, merupakan buah dari lobby politik Mgr Soegijapranata (Gerry van Klinken, 2010: 276).

Pengabdian akhir

Kecintaan kepada tanah air, bangsa dan negara telah menjadi urat nadi hidup Mgr Soegijapranata hingga akhir hidupnya. Dalam perjalanan tiga bulan terakhir sebelum wafat ke Eropa untuk berobat di Belanda dan menghadiri sidang lanjutan Konsili Vatikan II, beliau bertemu dengan Presiden Soekarno di Roma. Dalam akhir pertemuan tersebut Presiden mengatakan “Rama Agung, siang ini kami akan ke Perancis, menemui dan rundingan dengan Presiden De Gaul mengenai hal-hal yang cukup penting....maka mohon doa restu Rama Agung”. Mgr. Soegijapranata menjawabnya “Bapak Presiden...kami tidak tahu masalah apa yang akan dibicarakan di Paris, tapi tentu masalah-masalah penting untuk negara dan bangsa kita. Kami doakan, semoga pembicaraan-pembicaraan itu berhasil baik demi negara dan bangsa kita Indonesia...” (Sudimin dan Gunawan, 2015:51).

Ternyata momen itu merupakan pertemuan terakhir dua tokoh bangsa dan barangkali Presiden Soekarno juga tidak menduganya sampai akhirnya mendengar berita bahwa Rama Agung yang sangat dihormati itu telah wafat. Sebagai bentuk pengakuan terhadap pengabdian bagi nusa, bangsa dan negara, pada tanggal 24 Juli 1963 Presiden memerintahkan untuk membawa pulang dan memakamkan jenazah Rama Agung di Indonesia serta mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 152 tahun 1963 tanggal 26 Juli tentang pengangkatan Mgr Albertus Soegijapranata SJ sebagai Tokoh Nasional. Berkah Dalem. # (Tulisan ke-8 ini merupakan tulisan terakhir)



Sesaat setelah Soekarno dan Mohammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan, Mgr Soegijapranata langsung memerintahkan untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman pastoran Gedangan.